

ANALISIS PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014 - 2017

Raden Ajeng Lia Susilawati^a, Zainal Arifin^a Syamsul Hadi^a

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Indonesia

* Corresponding author: rajengliya43@gmail.com

Artikel Info

Article history:

Received 20 November 2019

Revised 27 November 2019

Accepted 29 November 2019

Available online 20
December 2019

Keyword:

*Economic Potential, Shift
Share, Location Quotient*

JEL Classification

F63, P48, Q56, R11, R58

Abstract

Regional development planning is something that must be considered and carried out periodically by looking at several aspects related to regional development. One important thing to note is the economic potential of the area. West Kalimantan Province is one of the provinces that has potential natural resources to be developed. However, it needs to be considered further, this is because development that focuses on the natural sector as a primary will have an impact on the weak competitiveness of the human resource sector. This study aims to analyze the leading sectors of the Province of West Kalimantan 2014-2017 and analyze the economic sectors that have the potential to be developed to support the economic growth of the Province of West Kalimantan. This study uses secondary data taken from the Central Statistics Agency (BPS) of West Kalimantan. Data analysis methods used in this study are Shift Share and Location Quotient. The Location Quotient results show that the leading sectors in the Province of West Kalimantan from 2014 to 2017 were Agriculture, Forestry and Fisheries, the Information and Communication sector, the Real Estate sector, the Government Administration sector, the Mandatory Social Security and Mandatory Social Security sector and the Health Services and Social Activities sector. While the shift share is known that the entire sector is a potential sector to be developed except the Agriculture, Forestry and Fisheries sectors..

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan dapat dikatakan sangat identik dengan ekonomi pembangunan. Bila sekiranya ruang gerak ekonomi pembangunan berusaha mencari strategi pembangunan, perencanaan pembangunan merupakan alat yang ampuh untuk menerjemahkan strategi pembangunan tersebut dalam berbagai program kegiatan yang terkoordinir. Koordinasi ini perlu dilakukan sehingga sasaran-sasaran, baik ekonomi maupun sosial, yang telah ditetapkan semula dapat dicapai secara lebih efisien. Dengan jalan demikian, akan dapat dihindari terjadinya pemborosan-pemborosan dalam pelaksanaan pembangunan (Fadel, 2012).

Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan ekonomi bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber-sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam rangka menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab. Dengan demikian diharapkan perekonomian wilayah dapat mencapai keadaan perekonomian yang lebih baik pada masa yang akan datang dibanding dengan keadaan sekarang ini, atau minimal sama dengan keadaan ekonomi sekarang (Waloyo, 2018).

Munculnya perencanaan pembangunan daerah, sebenarnya merupakan jawaban terhadap peningkatan kesenjangan pembangunan yang terjadi antar daerah. Kesenjangan ini bisa saja terjadi karena adanya perpindahan modal yang cenderung

menambah ketidakmerataan. Pada daerah-daerah yang sedang berkembang, permintaan barang atau jasa akan mendorong naiknya investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerah-daerah yang kurang berkembang, permintaan akan investasi rendah karena pendapatan masyarakat yang rendah. Perkembangan yang tidak merata ini pada akhirnya menimbulkan *backwash effect* sebagai kerugian yang diderita oleh daerah-daerah yang kurang berkembang akibat adanya ekspansi ekonomi dari daerah-daerah yang maju. Seharusnya tindakan pembangunan dari suatu daerah berkembang bisa memberikan keuntungan bagi daerah-daerah disekitarnya, dengan kata lain ekspansi pembangunan ekonomi daerah tersebut harus bisa memberikan *spread effects* bagi daerah-daerah lain (Dermawan & Yundy, 2012).

Jika terjadi perbedaan yang sangat jauh antara perkembangan ekonomi di daerah kaya dengan daerah miskin, akan terjadi proses pengkutuban (*polarization effects*), sebaliknya jika perbedaan diantara kedua daerah tersebut menyempit, berarti telah terjadi imbas yang baik karena ada proses penetesan kebawah (*trickle down effects*). Berdasarkan kedua pandangan di atas, dapat dikatakan bahwa perlunya perencanaan pembangunan daerah itu semata-mata bukan hanya untuk kepentingan daerah-daerah yang bersangkutan, melainkan yang lebih luas lagi adalah untuk kepentingan pembangunan nasional secara menyeluruh (Putra, 2011).

Kalimantan Barat (Kalbar) merupakan salah satu dari dua Provinsi di Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, tepatnya dengan Negara Bagian Sarawak mempunyai luas wilayah sebesar 146.807 km² (7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas Pulau Jawa). Berarti Kalimantan Barat menjadi Provinsi terluas keempat setelah Irian Jaya mencapai 319.036 km² (sebelum pemekaran), Kalimantan Timur mencapai 204.534 km² dan Kalimantan Tengah mencapai 153.564 km². Saat ini Kalimantan Barat terbagi menjadi 14 Kabupaten/Kota dan 2 kota. Dari 14 Kab/kota tersebut, terdapat tiga kabupaten yang paling luas wilayahnya yaitu Ketapang mencapai 31.240,74 km² (21,28 % dari luas provinsi), Kapuas Hulu mencapai 29.842 km² (20,33 % dari luas provinsi), dan Sintang mencapai 21.635 km² (14,74% dari luas provinsi). Sejak tahun 2014 perekonomian Kalimantan Barat didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kontribusi ketiga sektor ini mencapai 23,40%, lebih besar dari sektor pertanian 21,95% (Dinarjad, 2016).

Provinsi Kalimantan Barat memiliki beberapa potensi yang mampu dikembangkan menjadi sektor unggulan, misalnya sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, restoran dan hotel, transportasi dan jasa lainnya. Data mengenai kontribusi sektoral PDRB Provinsi Kalimantan Barat tahun 2008 hingga tahun 2014 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1. Kontribusi Sektoral PDRB Kalimantan Barat Tahun 2010 - 2014 (%)

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	Rerata
Pertanian	25,07	25,05	24,01	23,08	21,95	23,83
Perdagangan, Restoran dan Hotel	22,75	22,57	22,73	23,02	23,40	22,89
Industri Pengolahan	18,41	17,98	17,01	16,26	15,52	17,04
Bangunan	9,23	9,96	10,80	11,47	12,49	10,79
Jasa-Jasa	9,95	9,71	10,80	11,48	11,69	10,73
Pengangkutan dan Komunikasi	7,33	7,40	7,34	7,36	7,49	7,38
Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan	4,74	4,81	4,84	4,86	5,00	4,85
Pertambangan dan Penggalan	1,99	2,03	2,00	2,10	2,00	2,02
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,52	0,49	0,47	0,47	0,46	0,48

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa Kalimantan Barat memiliki potensi yang sangat besar. Namun perlu diingat bahwa potensi tersebut hanya akan bisa dimanfaatkan dengan baik jika dilakukan perencanaan pengembangan pembangunan yang baik. Pembangunan daerah yang terarah tentunya membutuhkan pengetahuan yang baik dan mendalam mengenai faktor yang berpengaruh pada sektor potensial serta strategi yang tepat untuk mengembangkan sektor potensial tersebut. Strategi ini juga dibutuhkan bagi Kalimantan Barat yang memiliki berbagai macam sektor potensial, sehingga dalam pembangunannya dibutuhkan rencana pembangunan daerah yang terarah dan tepat.

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki kekayaan alam potensial untuk dikembangkan. Namun perlu dipertimbangkan lebih lanjut, hal ini karena pembangunan yang berfokus pada sektor alam sebagai primer akan berdampak pada lemahnya daya saing sektor sumber daya manusia. Berdasarkan pada data Kontribusi Sektoral PDRB Kalimantan Barat Tahun 2010 – 2014, diketahui bahwa sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertanian dengan persentase sebesar 23,83%. Sektor pertanian merupakan penggunaan sumber daya alam yang relatif lebih lambat perkembangannya jika tidak diikuti dengan inovasi-inovasi pertanian. Oleh karena itu pemerintah Kalimantan Barat harus bisa melihat potensi perekonomian di Kalimantan Barat untuk memfokuskan pengembangan perekonomian, misalnya dengan pemanfaatan sektor pariwisata, hal ini didukung dengan bentang alam di Kalimantan Barat yang memiliki berbagai objek wisata (Triyuwono & Yustika, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh (Dinarjad, 2016) tentang Potensi dan Tantangan Pengembangan Sektor Unggulan di Kalimantan Barat menyatakan bahwa beberapa tantangan di Kalimantan Barat diantaranya sumber daya manusia (SDM) masih lemah, infrastruktur (listrik, gas dan pasokan air, ekspor jalan dan pelabuhan) terbatas, serta pemasaran dan jaringan masih lemah. Sehingga sangat diperlukan sebuah pengamatan yang fokus pada sektor potensial dan sektor unggulan di Kalimantan Barat, dengan tujuan agar pembangunan pada masa yang akan datang di Kalimantan Barat sudah bisa difokuskan pada sektor potensialnya. Berdasarkan uraian diatas ini maka akan dilakukan penelitian tentang “Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi di Kalimantan Barat”. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada

objek yang diteliti. Dimana pada penelitian terdahulu hanya mengambil satu kab/kota dan hanya mengambil beberapa sektor saja sedangkan penelitian yang saya lakukan ini mengambil seluruh kab/kota dan seluruh sektor yang ada di Kalimantan Barat.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis sektor unggulan yang dimiliki Provinsi Kalimantan Barat 2014 – 2017, serta untuk menganalisis sektor-sektor ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dimana data PDRB diolah menggunakan alat analisis *Shift Share* dan *Location Quotient* dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2014-2017. Lokasi penelitian ini terletak di Provinsi Kalimantan Barat, alasan menggunakan data Kalimantan Barat sebagai penelitian dikarenakan banyaknya potensi ekonomi di Kalimantan Barat yang bisa dilihat dari persentase kontribusi sektoral PDRB Kalimantan Barat Tahun 2014 – 2017. Selain itu provinsi Kalimantan Barat juga merupakan provinsi terluar yang berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga berpotensi dalam perdagangan lintas negara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data PDRB Provinsi Kalimantan Barat dan Data kependudukan wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan sekitarnya dari tahun 2014 – 2017 Sumber data tersebut adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat serta sumber lainnya yang berasal dari penelitian sebelumnya

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang merupakan kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur serta publikasi-publikasi lain yang layak dijadikan sumber. Selanjutnya yaitu dengan teknik dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan (Bungin, 2015).

Penelitian ini membahas tentang sektor ekonomi potensial dan sektor ekonomi unggulan di Kalimantan Barat tahun 2014 - 2017. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data PDRB Provinsi Kalimantan Barat dan Data kependudukan wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan sekitarnya dari tahun 2014 – 2017 Sumber data tersebut adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat serta sumber lainnya yang berasal dari penelitian sebelumnya.

Variabel yang digunakan terdiri dari: (1) Sektor potensial merupakan sektor yang memiliki potensi dan dapat dikembangkan lebih lanjut guna mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, (2) sektor unggulan adalah sektor yang mampu memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB suatu wilayah, yang biasanya sektor unggulan ini memiliki persentase yang besar bagi pendapatan perekonomian tingkat daerah ataupun perekonomian tingkat nasional, (3) Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dengan

pengurannya yaitu menggunakan PDRB yang merupakan perbandingan total produksi barang dan jasa pada suatu wilayah tertentu.

Analisa ini digunakan untuk menjawab tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk menganalisis pergeseran sektor perekonomian kabupaten kota yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat. Penggunaan analisa ini untuk mengidentifikasi keunggulan daerah dan menganalisa sektor yang menjadi dasar perekonomian daerah. Metode analisa data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu analisa analisis *Location Quotient* dan analisis *Shift Share*.

Metode *Static Location Quotient* menggunakan rumus sebagai berikut.

$$SLQ = \frac{S_{ik}/PDRB_k}{S_{ip}/PDRB_p} \dots\dots\dots \text{Persamaan 1}$$

Sumber : Modul Ekonomi Regional UMM, 28

Keterangan:

- S_{ik} = Sumbangan sektor i daerah studi k dalam pembentukan PDRB Riil daerah studi k .
- $PDRB_k$ = PDRB total di semua sektor di daerah studi k
- S_{ip} = Sumbangan sektor i daerah referensi p dalam pembentukan PDRB daerah referensi p .
- $PDRB_p$ = PDRB total di semua sektor daerah referensi p

Berdasarkan formulasi tersebut, maka akan ada tiga kemungkinan nilai SLQ yang dapat ditentukan, yaitu (1) Nilai SLQ di sektor $i = 1$. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah studi k adalah sama dengan laju pertumbuhan sektor yang sama di daerah referensi p . Sektor tersebut menjadi basis (B) atau memiliki keunggulan komparatif. (2) Nilai SLQ di sektor $i > 1$. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah studi k adalah lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor yang sama di daerah referensi p . Sektor tersebut merupakan sektor unggulan sekaligus basis (B) atau dapat dikembangkan lebih lanjut. (3) Nilai SLQ di sektor $I < 1$. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor I di daerah studi k adalah lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor yang sama di daerah referensi p . Sektor tersebut merupakan sektor non basis (NB) atau tidak prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut (Suparmoko, 2012).

Analisis ini digunakan untuk mengukur perubahan dan pertumbuhan (baik positif maupun negatif) yang terjadi dalam struktur ekonomi wilayah lokal dikaitkan dengan kerangka ekonomi referensi yang lebih besar untuk satu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi lokal diasumsikan dapat dikomposisikan menjadi dua komponen : (1) Komponen Share, ialah komponen kontribusi dari pertumbuhan perekonomian wilayah referensi secara keseluruhan. (2) Komponen Shift, ialah simpangan atau pergeseran terhadap komponen Share.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi dari empat provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, keempat provinsi tersebut adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Provinsi yang terletak di Pulau Kalimantan atau yang biasa dikenal Pulau Borneo ini berbatasan darat langsung dengan Negara Brunei dan Malaysia yang terletak di pulau yang sama. Letak Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur ini sendiri telah

membuat Kalimantan Barat menjadi satusatunya provinsi di Indonesia yang memiliki akses jalan darat resmi untuk lintas batas negara. Terbukanya jalan darat antar negara, yaitu Pontianak – Entikong - Kuching (Sarawak, Malaysia Timur) sepanjang sekitar 400 km yang dapat ditempuh hanya dalam waktu enam hingga delapan jam perjalanan (Warsilah & Wardiat, 2018).

Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat dari Pulau Kalimantan atau terletak di antara 2°8'LU - 3°02'LS dan 108°30' - 114°10'BB. Berdasarkan posisi geografis tertentu, wilayah Kalimantan Barat dilewati garis equator (lintang 0°) tepat di atas kota Pontianak. Karena pengaruh situasi ini, Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah tropis dengan suhu udara dan kelembaban udara yang tinggi. Wilayah Kalimantan Barat adalah sekitar 146.807 km², dimana sebagian besar adalah merupakan dataran berdataran rendah. Dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia, wilayah Kalimantan Barat hanya sekitar 7,53 persen saja .

Secara umum, daratan Kalimantan Barat merupakan dataran rendah dan mempunyai ratusan sungai yang aman bila dilayari, sedikit berbukit yang menghampar dari Barat ke Timur sepanjang "Lembah Kapuas". Sungai terbesar adalah Sungai Kapuas, yang dianggap sebagai sungai terpanjang di Indonesia dan memiliki panjang 1.086 kilometer. Gunung tertinggi adalah Gunung Baturaya atau Bukitraya dengan ketinggian 2.278 meter (BPS, 2018). Data mengenai luas wilayah berdasarkan kabupaten kota yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota tahun 2017

No.	Kabupaten Kota	Ibu Kota Kab./Kota	Luas (km ²)	Persentase pada Luas Provinsi (%)
1	Kab. Ketapang	Ketapang	31.241	21,28
2	Kab. Kapuas Hulu	Puttusbau	29.842	20,33
3	Kab. Sintang	Sintang	21.635	14,74
4	Kab. Sanggau	Sanggau	12.858	8,76
5	Kab. Melawi	Nanga Pinoh	10.644	7,25
6	Kab. Landak	Ngabang	9.909	6,75
7	Kab. Kubu Raya	Sei Raya	6.985	4,76
8	Kab. Sambas	Sambas	6.395	4,36
9	Kab. Sekadau	Sekadau	5.444	3,71
10	Kab. Bengkayang	Bengkayang	5.397	3,68
11	Kab. Kayong Utara	Sukadana	4.568	3,11
12	Kab. Pontianak	Mempawah	1.277	0,87
13	Kota Singkawang	Singkawang	504	0,34
14	Kota Pontianak	Pontianak	108	0,07

Sumber : Badan Pusat Statistik, (2018)

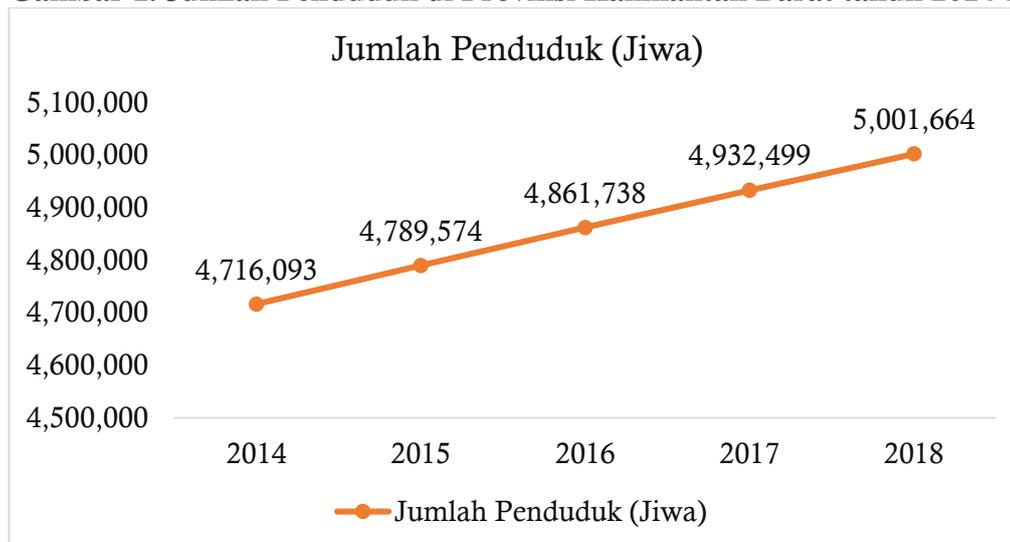
Berdasarkan data mengenai Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota tahun 2017, maka dapat diketahui bahwa Kab. Ketapang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah terbesar dengan luas mencapai 31.241 km² atau sebesar 21,28%

dari total luas Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya Kab. Kapuas Hulu merupakan kabupaten dengan luas terbesar kedua dengan luas sebesar 29.842 km² atau mencapai 20,33 dari total luas Provinsi Kalimantan Barat, kemudian kabupaten yang memiliki luas wilayah terbesar ketiga adalah Kab. Sintang dengan luas mencapai 21.635 km² atau mencapai 14,74% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan daerah yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kota Pontianak dengan luas hanya sebesar 108 km² atau hanya mencapai 0,07% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Kalimantan Barat dijuluki sebagai Provinsi Seribu Sungai karena memiliki ratusan sungai besar dan kecil yang sering dilayari. Salah satu sungai tersebut adalah Sungai Kapuas yang menjadi sungai terpanjang di Indonesia sepanjang 1.086 kilometer. Selain sungai-sungai provinsi ini memiliki beberapa danau dengan danau tersebar yaitu Danau Sentarum seluas 117.500 Ha. Provinsi ini memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan iklim basah. Tidak hanya sungai dan juga danau, Provinsi ini memiliki sumber daya alam lain yaitu deposit pertambangan yakni emas, mangan, bauksit, pasir, kuarsa, kaolin, dan batu bara.

Provinsi Kalimantan Barat sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam serta didukung dengan keindahan bentang alamnya, merupakan peluang yang besar bagi Provinsi Kalimantan Barat dalam hal industri pariwisata. Hal ini terlihat dari upaya pengembangan pariwisata yang disampaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Peumahan Rakyat melalui Rencana Pengembangan Kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia, yang dinyatakan bahwa salah satu kawasan potensi pariwisata adalah Danau Sajingan yang terletak di Kec. Sajingan, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Danau ini mempunyai air yang sangat bersih dan pemandangan yang indah. Selanjutnya pantai Selimpai di Kecamatan Paloh. Kelebihan pantai ini di bandingkan dengan pantai lainnya yaitu lokasinya yang terletak di sebuah pulau kecil, dihiasi pohon pinus di tengah-tengahnya.

Gambar 1. Jumlah Penduduk di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik, (2018)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk di Kalimantan Barat pada setiap tahun terus mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2014 jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Barat mencapai 4.716.093 jiwa, selanjutnya pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 4.789.574 jiwa, kemudian pada tahun 2016 menjadi 4.861.738 jiwa, selanjutnya pada tahun 2017 menjadi 4.932.499 jiwa, kemudian pada tahun 2018 menjadi 5.001.664 jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2018) diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan kabupaten kota adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten Kota

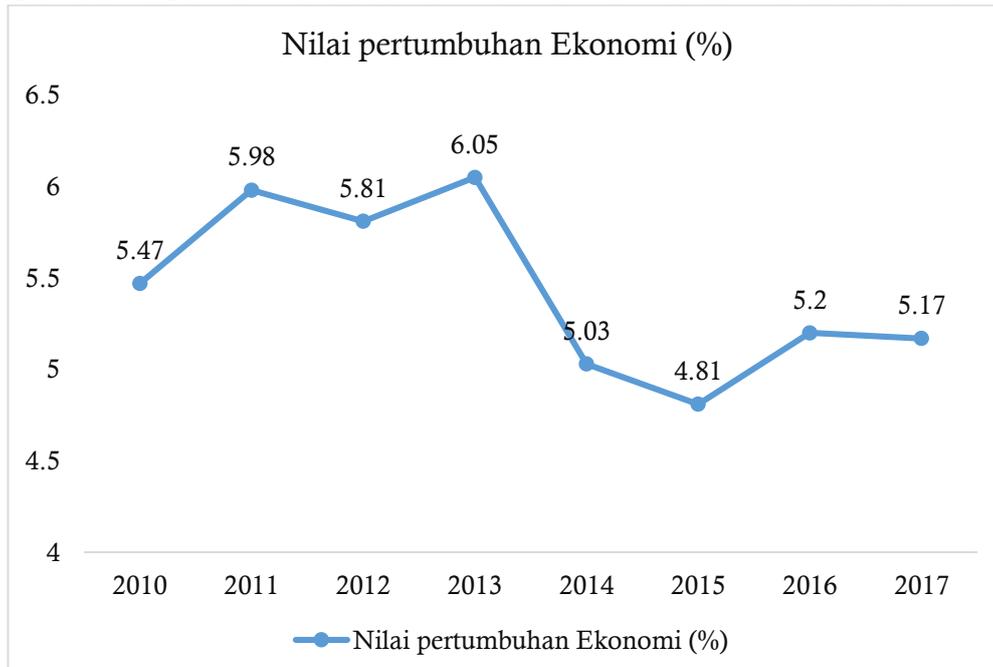
Kabupaten Kota	Jumlah penduduk (Jiwa)	Persentase
Kota Pontianak	637.723	12,8%
Kubu Raya	570.914	11,4%
Sambas	532.609	10,6%
Ketapang	504.008	10,1%
Sanggau	463.995	9,3%
Sintang	413.369	8,3%
Landak	372.609	7,4%
Mempawah	261.299	5,2%
Kapuas Hulu	258.984	5,2%
Bengkayang	251.320	5,0%
Kota Singkawang	219.061	4,4%
Melawi	205.298	4,1%
Sekadau	199.576	4,0%
Kayong Utara	110.899	2,2%

Sumber : Badan Pusat Statistik, (2018)

Berdasarkan data di atas maka diketahui bahwa Kota Pontianak merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak pertama di Kalimantan Barat, dengan jumlah penduduk sebesar 637.723 jiwa atau mencapai 12,8% dari total penduduk yang terdapat di Kalimantan Barat. Selanjutnya Kubu Raya merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Kalimantan Barat, dengan jumlah penduduk sebesar 570.914 jiwa atau mencapai 11,4% dari total penduduk yang terdapat di Kalimantan Barat. Kemudian Sambas merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ketiga di Kalimantan Barat, dengan jumlah penduduk sebesar 532.609 jiwa atau mencapai 10,6% dari total penduduk yang terdapat di Kalimantan Barat. Selanjutnya Ketapang merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di Kalimantan Barat, dengan jumlah penduduk sebesar 504.008 jiwa atau mencapai 10,1% dari total penduduk yang terdapat di Kalimantan Barat. Kemudian Sanggau merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kelima di Kalimantan Barat, dengan jumlah penduduk sebesar 463.995 jiwa atau mencapai 9,3% dari total penduduk yang terdapat di Kalimantan Barat. Selanjutnya Sintang merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak keenam di Kalimantan Barat, dengan jumlah penduduk sebesar

413.369 jiwa atau mencapai 8,3% dari total penduduk yang terdapat di Kalimantan Barat. Kemudian Landak merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ketujuh di Kalimantan Barat, dengan jumlah penduduk sebesar 372.609 jiwa atau mencapai 7,4% dari total penduduk yang terdapat di Kalimantan Barat. Selanjutnya Mempawah merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedelapan di Kalimantan Barat, dengan jumlah penduduk sebesar 261.299 jiwa atau mencapai 5,2% dari total penduduk yang terdapat di Kalimantan Barat. Kemudian Kapuas Hulu merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kesembilan di Kalimantan Barat, dengan jumlah penduduk sebesar 258.984 jiwa atau mencapai 5,2% dari total penduduk yang terdapat di Kalimantan Barat. Selanjutnya Bengkayang merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kesepuluh di Kalimantan Barat, dengan jumlah penduduk sebesar 251.320 jiwa atau mencapai 5,0% dari total penduduk yang terdapat di Kalimantan Barat. Kemudian Kota Singkawang merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kesebelas di Kalimantan Barat, dengan jumlah penduduk sebesar 219.061 jiwa atau mencapai 4,4% dari total penduduk yang terdapat di Kalimantan Barat. Selanjutnya Melawi merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak keduabelas di Kalimantan Barat, dengan jumlah penduduk sebesar 205.298 jiwa atau mencapai 4,1% dari total penduduk yang terdapat di Kalimantan Barat. Kemudian Sekadau merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ketigabelas di Kalimantan Barat, dengan jumlah penduduk sebesar 199.576 jiwa atau mencapai 4,0% dari total penduduk yang terdapat di Kalimantan Barat. Selanjutnya Kayong Utara merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit di Kalimantan Barat, dengan jumlah penduduk sebesar 110.899 jiwa atau mencapai 2,2% dari total penduduk yang terdapat di Kalimantan Barat.

Gambar 2. Jumlah Penduduk di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik, (2018)

Berdasarkan grafik diatas, maka diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat mengalami fluktuasi, hal ini diketahui pada tahun 2010 nilai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 5,47%. Selanjutnya data pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan mengalami kenaikan sebesar 0,51% pada tahun 2011 menjadi sebesar 5,98%. Kemudian data pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan mengalami penurunan sebesar 0,17% pada tahun 2012 menjadi sebesar 5,81%. Selanjutnya data pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan mengalami kenaikan sebesar 0,24% pada tahun 2013 menjadi sebesar 6,05%. Kemudian data pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan mengalami penurunan sebesar 1,02% pada tahun 2014 menjadi sebesar 5,03%. Selanjutnya data pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan mengalami penurunan sebesar 0,22% pada tahun 2015 menjadi sebesar 4,81%. Kemudian data pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan mengalami kenaikan sebesar 0,39% pada tahun 2016 menjadi sebesar 5,2%. Selanjutnya data pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan mengalami penurunan sebesar 0,03% pada tahun 2017 menjadi sebesar 5,17%.

Selanjutnya Sektor unggulan yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat 2014 - 2017 dilihat melalui hasil analisis *Location Quotient* dengan jangka waktu analisis yaitu 2014 hingga tahun 2017. Hasil analisis *Location Quotient* berdasarkan sektor usaha di Provinsi Kalimantan Barat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2. Analisis *Location Quotient* di Provinsi Kalimantan Barat

Kategori Lapangan Usaha (Seri 2010)	SLQ		DLQ	LQ
	Rerata	Kriteria	Rerata	SLQ/DLQ
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,15	Basis	1,22	Unggulan
Pertambangan dan Penggalian	1,00	Basis	0,84	Prospektif
Industri Pengolahan	0,86	Non Basis	1,10	Andalan
Pengadaan Listrik, Gas	0,87	Non Basis	1,19	Andalan
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,87	Non Basis	1,10	Andalan
Konstruksi	0,98	Non Basis	1,01	Andalan
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,01	Basis	0,91	Prospektif
Transportasi dan Pergudangan	0,72	Non Basis	1,06	Andalan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,98	Non Basis	1,09	Andalan
Informasi dan Komunikasi	1,00	Basis	1,08	Unggulan
Jasa Keuangan	0,80	Non Basis	1,05	Andalan
Real Estate	1,07	Basis	1,06	Unggulan
Jasa Perusahaan	0,89	Non Basis	1,06	Andalan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,12	Basis	1,02	Unggulan
Jasa Pendidikan	0,93	Non Basis	1,06	Andalan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,10	Basis	1,06	Unggulan
Jasa Lainnya	0,92	Non Basis	1,06	Andalan

Sumber: Data dianalisis, 2019

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pada perhitungan SLQ pada sektor yang termasuk sektor basis dari rata-rata SLQ kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat pada tahun 2014 hingga 2017 adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Real Estate, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan sektor.

Berdasarkan perhitungan nilai LQ (SLQ/DLQ) secara rata-rata pada kabupaten kota di Kalimantan Barat, diketahui bahwa beberapa sektor yang tergolong pada sektor unggulan adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Real Estate, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Selanjutnya sektor yang tergolong pada sektor andalan adalah Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik, Gas, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Konstruksi, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Jasa Keuangan, sektor Jasa Perusahaan, sektor Jasa Pendidikan dan sektor Jasa Lainnya. Sedangkan yang termasuk pada sektor prospektif adalah sektor Pertambangan dan Penggalian dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Sektor unggulan yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat 2014 - 2017 dilihat melalui hasil analisis *Location Quotient* dengan jangka waktu analisis yaitu 2014 hingga tahun 2017 yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Real Estate, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sektor unggulan di Kalimantan Barat memiliki kaitan dengan potensi demografi dengan pertumbuhan penduduk yang terus mengalami kenaikan dari setiap tahun serta sumber daya alam yang melimpah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bappenas (2015) dalam Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2015, yang menyampaikan bahwa Kalimantan Barat memiliki potensi yang besar yaitu meliputi sumber daya alam dengan kandungan minyak dan gas, kandungan mineral logam, sumber daya hutan dan perairan, pengembangan pertanian dan agribisnis, serta potensi pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah kelembagaan yang ramah dunia usaha. Pencapaian nilai tambah pada komponen investasi diantaranya dipengaruhi oleh pembenahan sarana infrastruktur, pengurusan perizinan usaha, kepastian hukum dan kondisi keamanan suatu daerah.

Pertumbuhan proporsional adalah komponen nilai untuk menunjukkan apakah sektor tertentu di Provinsi Kalimantan Barat merupakan sektor yang mampu tumbuh cepat nasional atau justru pertumbuhannya lambat. Hasil analisis pada pertumbuhan proporsional setiap sektor ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. PP setiap sektor di Kalimantan Barat tahun 2014 – 2017

No.	Sektor	Rerata PP	Keterangan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,30	Tumbuh lambat
2	Pertambangan dan Penggalian	-0,24	Tumbuh lambat
3	Industri Pengolahan	1,28	Tumbuh cepat
4	Pengadaan Listrik, Gas	1,39	Tumbuh cepat
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,95	Tumbuh cepat
6	Konstruksi	1,30	Tumbuh cepat
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,59	Tumbuh cepat
8	Transportasi dan Pergudangan	0,96	Tumbuh cepat
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,91	Tumbuh cepat
10	Informasi dan Komunikasi	1,15	Tumbuh cepat
11	Jasa Keuangan	1,19	Tumbuh cepat
12	Real Estate	0,96	Tumbuh cepat
13	Jasa Perusahaan	0,92	Tumbuh cepat
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,35	Tumbuh cepat
15	Jasa Pendidikan	0,91	Tumbuh cepat
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,94	Tumbuh cepat
17	Jasa Lainnya	0,94	Tumbuh cepat

Sumber: Data dianalisis, 2019

Berdasarkan hasil analisis di atas, diketahui bahwa terdapat beberapa sektor yang tergolong pada sektor yang mengalami pertumbuhan cepat, sektor-sektor tersebut yaitu: (a) Industri Pengolahan, (b) Pengadaan Listrik, Gas, (c) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (d) Konstruksi, (e) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (f) Transportasi dan Pergudangan, (g) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (h) Informasi dan Komunikasi, (i) Jasa Keuangan, (j) Real Estate, (k) Jasa Perusahaan, (l) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (m) Jasa Pendidikan, (n) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan (o) Jasa Lainnya. Hal ini diketahui dari nilai rerata pertumbuhan proporsional yang menghasilkan nilai > 0 , sehingga dinyatakan sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan secara cepat.

Sedangkan sektor yang tergolong pada sektor yang memiliki pertumbuhan secara lambat yaitu sektor (a) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan (b) Pertambangan dan Penggalian. Hal ini diketahui dari nilai rerata pertumbuhan proporsional yang menghasilkan nilai < 0 , sehingga dinyatakan sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan secara lambat.

Nilai PPW yang positif dapat diartikan bahwa sektor tersebut memiliki daya saing yang tinggi terhadap produk-produk dari luar. Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) merupakan perubahan kesempatan kerja pada suatu wilayah yang disebabkan oleh keunggulan komparatif wilayah tersebut, adanya dukungan dari lembaga, prasarana sosial ekonomi, dan kebijakan lokal pada wilayah tersebut. Hasil analisis pada Pertumbuhan proporsional setiap sektor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. PPW setiap sektor di Kalimantan Barat tahun 2014 – 2017

No.	Sektor	Rerata PPW	Keterangan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,061	Mempunyai daya saing
2	Pertambangan dan Penggalian	1,381	Mempunyai daya saing
3	Industri Pengolahan	1,086	Mempunyai daya saing
4	Pengadaan Listrik, Gas	1,582	Mempunyai daya saing
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,990	Mempunyai daya saing
6	Konstruksi	1,389	Mempunyai daya saing
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,395	Mempunyai daya saing
8	Transportasi dan Pergudangan	-0,200	Tidak mempunyai daya saing
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,071	Tidak mempunyai daya saing
10	Informasi dan Komunikasi	0,850	Mempunyai daya saing
11	Jasa Keuangan	-0,176	Tidak mempunyai daya saing
12	Real Estate	0,375	Mempunyai daya saing
13	Jasa Perusahaan	-0,116	Tidak mempunyai daya saing
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,251	Mempunyai daya saing
15	Jasa Pendidikan	-0,105	Tidak mempunyai daya saing
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,601	Mempunyai daya saing
17	Jasa Lainnya	0,638	Mempunyai daya saing

Sumber: Data dianalisis, 2019

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sektor-sektor yang memiliki daya saing (kompetitif) dengan daerah lain adalah sektor: (a) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, (b) Real Estate, (c) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, (d) Jasa Lainnya, (e) Informasi dan Komunikasi, (f) Industri Pengolahan, (g) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (h) Pertambangan dan Penggalian, (i) Konstruksi, (j) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (k) Pengadaan Listrik, Gas, (l) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Hal ini diketahui dari nilai rerata pertumbuhan pangsa wilayah yang menghasilkan nilai > 0 , sehingga dinyatakan sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang memiliki daya saing (kompetitif) dengan daerah lain.

Sedangkan sektor yang tergolong pada sektor yang tidak memiliki daya saing (tidak kompetitif) dengan daerah lain yaitu sektor (a) Transportasi dan Pergudangan, (b) Jasa Keuangan, (c) Jasa Perusahaan, (d) Jasa Pendidikan, dan sektor (e) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Hal ini diketahui dari nilai rerata pertumbuhan pangsa wilayah yang menghasilkan nilai < 0 , sehingga dinyatakan sektor-sektor tersebut tidak memiliki daya saing (tidak kompetitif) dengan daerah lain.

Pergeseran Bersih (PB) merupakan jumlah antara kedua komponen yaitu antara pertumbuhan pangsa wilayah (PPW) dan pertumbuhan proporsional (PP). Kriteria penilaian pergeseran bersih (PB) adalah jika PB bernilai positif ($PB > 0$), maka pertumbuhan sektor tertentu pada wilayah Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Barat termasuk ke dalam kategori progresif (maju) dan sebaliknya apabila bernilai negatif ($PB < 0$) pertumbuhan sektor tertentu masuk ke dalam kategori lamban. Hasil analisis pada Pertumbuhan proporsional setiap sektor pada tabel berikut.

Tabel 4.6 PB setiap sektor di Kalimantan Barat tahun 2014 – 2017

No.	Sektor	Rerata PB	Keterangan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,24	Mundur
2	Pertambangan dan Penggalian	1,14	Progresif
3	Industri Pengolahan	2,36	Progresif
4	Pengadaan Listrik, Gas	2,97	Progresif
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,94	Progresif
6	Konstruksi	2,69	Progresif
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,99	Progresif
8	Transportasi dan Pergudangan	0,75	Progresif
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,84	Progresif
10	Informasi dan Komunikasi	2,00	Progresif
11	Jasa Keuangan	1,01	Progresif
12	Real Estate	1,34	Progresif
13	Jasa Perusahaan	0,81	Progresif
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,60	Progresif
15	Jasa Pendidikan	0,81	Progresif
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,54	Progresif
17	Jasa Lainnya	1,58	Progresif

Sumber: Data dianalisis, 2019

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan progresif adalah sektor: (a) Pertambangan dan Penggalian, (b) Industri Pengolahan, (c) Pengadaan Listrik, Gas, (d) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (e) Konstruksi, (f) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (g) Transportasi dan Pergudangan, (h) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (i) Informasi dan Komunikasi, (j) Jasa Keuangan, (k) Real Estate, (l) Jasa Perusahaan, (m) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (n) Jasa Pendidikan, (o) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, (p) Jasa Lainnya. Hal ini diketahui dari nilai rerata pergeseran bersih yang menghasilkan nilai > 0 , sehingga dinyatakan sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan progresif.

Sedangkan sektor yang tergolong pada sektor yang tidak memiliki pertumbuhan progresif atau menurun yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Hal ini diketahui dari nilai rerata pergeseran bersih yang menghasilkan nilai < 0 , sehingga dinyatakan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tidak progresif.

Kemudian sektor ekonomi potensial di Provinsi Kalimantan Barat diperoleh dengan menggunakan analisis *Shift Share* yang bisa diketahui dari tabel berikut.

Tabel 3. Sektor Potensial di Kalimantan Barat tahun 2014 – 2017

No.	Sektor	PB	PP	PPW	Total	Keterangan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,241	-0,301	0,061	-0,481	Non Potensial
2	Pertambangan dan Penggalian	1,139	-0,241	1,381	2,279	Potensial
3	Industri Pengolahan	2,363	1,277	1,086	4,727	Potensial
4	Pengadaan Listrik, Gas	2,974	1,392	1,582	5,948	Potensial
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	2,938	0,947	1,990	5,875	Potensial
6	Konstruksi	2,691	1,303	1,389	5,383	Potensial
7	Perdagangan dan Reparasi kendaraan bermotor	2,990	1,595	1,395	5,980	Potensial
8	Transportasi dan Pergudangan	0,755	0,955	-0,200	1,509	Potensial
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,838	0,909	-0,071	1,676	Potensial
10	Informasi dan Komunikasi	1,999	1,149	0,850	3,998	Potensial
11	Jasa Keuangan	1,010	1,186	-0,176	2,020	Potensial
12	Real Estate	1,337	0,962	0,375	2,674	Potensial
13	Jasa Perusahaan	0,808	0,924	-0,116	1,616	Potensial
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos	2,596	1,345	1,251	5,191	Potensial
15	Jasa Pendidikan	0,808	0,912	-0,105	1,615	Potensial
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,543	0,941	0,601	3,085	Potensial
17	Jasa Lainnya	1,578	0,940	0,638	3,156	Potensial

Sumber: Data dianalisis, 2019

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sektor-sektor yang termasuk pada sektor potensial untuk dikembangkan di Kalimantan Barat adalah sektor: (a) Pertambangan dan Penggalian, (b) Industri Pengolahan, (c) Pengadaan Listrik, Gas, (d) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (e) Konstruksi, (f) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (g) Transportasi dan Pergudangan, (h) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (i) Informasi dan Komunikasi, (j) Jasa Keuangan, (k) Real Estate, (l) Jasa Perusahaan, (m) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (n) Jasa Pendidikan, (o) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, (p) Jasa Lainnya.

Sedangkan sektor yang tergolong pada sektor yang tidak potensial untuk dikembangkan yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Hal ini diketahui dari nilai total shift share yang menghasilkan nilai < 0 , sehingga dinyatakan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan bukan merupakan sektor yang potensial. Hal ini menunjukkan bahwa SDA yang terdapat di Kalimantan, khususnya pemanfaatan dibidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan belum optimal dikembangkan. Beberapa faktor bisa disebabkan oleh kurangnya kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola, serta penyediaan infrastruktur yang masih minim dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini diakui oleh Gubernur Kalimantan Barat (H Sutarmidji) yang menyatakan bahwa kemajuan infrastruktur provinsi ini belum signifikan dan meminta agar pihak PUPR Kalbar dapat membereskan pekerjaan yang tidak kunjung selesai (Harian Bisnis, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bahwa sektor unggulan yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014 hingga tahun 2017 adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Informasi dan Komunikafmetsi, sektor Real Estate, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Selanjutnya hasil analisis Shift Share diketahui bahwa sektor yang potensial untuk dikembangkan di Provinsi Kalimantan Barat adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pengadaan Listrik, Gas, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Jasa Keuangan, Sektor Real Estate, Sektor Jasa Perusahaan, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor Jasa Pendidikan, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Sektor Jasa Lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2018). *Kalimantan Barat dalam Angka*. Kalimantan Barat.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dermawan, A., & Yundy, H. (2012). *Model-model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah: Konsep dan Aplikasi*. Bogor: IPB Press.
- Dinarjad, A. (2016). Potensi dan Tantangan Pengembangan Sektor Unggulan di Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, IV(2)*.
- Fadel, M. (2012). *Reiventing Local Government: Pengalaman dari Daerah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Harian Bisnis. (2019). Kemajuan Infrastruktur Kalbar Belum Signifikan. *Harian Bisnis Kalimantan*. Retrieved from <https://kalimantan.bisnis.com/read/20191203/407/1177222/kemajuan-infrastruktur-kalbar-belum-signifikan>
- Putra, F. (2011). *Studi Kebijakan Publik dan Pemerintahan dalam Perspektif Kuantitatif Teknik, Metode, dan Pendekatan*. Malang: UB Press.
- Suparmoko, M. (2012). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Triyuwono, I., & Yustika Ahmad, E. (2013). *Emansipasi Nilai Lokal Ekonomi & Bisnis pasca sentralisasi Pembangunan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Waloyo, A. (2018). *Analisis Potensi Ekonomi dan Sektor Unggulan Ekonomi di Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2015*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Warsilah, H., & Wardiat, D. (2018). *Pembangunan Sosial di Wilayah Perbatasan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*. Jakarta: Gramedia.